

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pelaksanaan otonomi daerah diatur dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan amanah Undang Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah yang memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ciri utama kemampuan keuangan daerah terletak pada kemampuan mengelola keuangan daerahnya artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber- sumber keuangannya sendiri. Menurut Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah menyebutkan bahwa sumber- sumber penerimaan daerah dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah adalah dari PAD, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain- lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan dari daerah itu sendiri yang terdiri dari 1) hasil pajak daerah 2) hasil dari restribusi daerah 3) hasil dari perusahaan milik daerah dan

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 4) lain- lain pendapatan asli daerah yang sah.

Sumber dana yang tersedia diharapkan dapat menyangga dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah. Dengan semakin banyak kebutuhan daerah dapat dibiayai oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka semakin tinggi pula tingkat kualiatas otonomi daerah, jug semakin mandiri dalam bidang keuangan daerah. Semua pendapatan daerah itu mempunyai perana penting dalam keuangan daerah yang merupakan tolok ukur didalam pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab serta proporsional. Semakin maju suatu daerah akan semakin banyak fasilitas/ jasa yang perlu dan disediakan untuk pemenuhan kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat sehingga semakin banyak pula jasa- jasa retribusi yang dapat dipungut oleh daerah. Pada prinsipnya semakin besar kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat. Dengan kontribusi yang semakin meningkat, diharapkan pemerintah daerah semakin mampu membiayai keuangannya.

Keberhasilan pembangunan perekonomian dari suatu wilayah dan kinerjanya dapat diamati melalui beberapa indikator makro. Indikator makro tersebut dianalisis melalui PDRB yang dapat didefinisikan sebagai penjumlahan nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh unit kegiatan ekonomi yang beroperasi diwilayah atau daerah tersebut dalam periode tertentu. Jadi PDRB adalah nilai tambah yang pengukurannya berdasarkan

adanya aktifitas ekonomi di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi daerah berkaitan erat dengan kenaikan produksi barang dan jasa, yang diukur dengan besaran dalam produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan juga sebagai indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah dalam suatu periode tertentu. Data PDRB juga menggambarkan kemampuan daerah mengelola sumber daya pembangunan yang dimilikinya, oleh karena itu besaran PDRB setiap daerah bervariasi sesuai dengan potensi yang dimiliki dan faktor produksi masing-masing daerah (Sukirno, 1978).

Faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi dari suatu negara atau masyarakat yaitu pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja secara tradisional telah dianggap positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi, artinya semakin banyak angkatan kerja, berarti semakin produktif tenaga kerja, sedangkan semakin banyak penduduk akan meningkatkan pasar domestik. Namun demikian semuanya tergantung pada kemampuan sistem perekonomian untuk menyerap dan mempekerjakan tambahan pekerja itu secara produktif (Todaro, 1997).

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu instrumen utama kebijakan dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat daerah. Pengeluaran pemerintah merupakan seperangkat produk yang dihasilkan yang memuat pilihan atau keputusan yang dibuat pemerintah untuk menyediakan barang-barang publik dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu pemerintah dan DPRD harus berupaya secara nyata dan terstruktur untuk menghasilkan APBD yang betul betul

mencerminkan kebutuhan riil masyarakat di daerah sesuai dengan potensi masing-masing. Untuk melihat apakah daerah telah siap secara finansial untuk menyongsong otonomi daerah, antara lain dengan melihat apakah sumber-sumber penerimaan APBD mampu menutup anggaran daerah yang bersangkutan. Disamping itu anggaran belanja pembangunan yang dialokasikan pada program proyek yang langsung menyentuh sektor ekonomi produktif masyarakat akan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat (Uppal, 1986).

Penduduk merupakan salah satu faktor penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan penduduk merupakan sumber daya manusia yang partisipasinya sangat diperlukan agar pelaksanaan hasil-hasil perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik. Dengan didukung bukti empiris, pertumbuhan penduduk yang tinggi akan menaikkan output melalui penambahan dan tingkat ekspansi pasar baik dalam negeri maupun luar negeri. Penambahan penduduk tinggi yang diiringi dengan perubahan teknologi akan mendorong tabungan dan penggunaan skala ekonomi didalam produksi. Penambahan penduduk merupakan suatu hal yang dibutuhkan dan bukan merupakan suatu masalah, melainkan sebagai unsur penting yang dapat memacu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Besarnya pendapatan dapat mempengaruhi penduduk. Jika jumlah penduduk meningkat, maka pendapatan yang dapat ditarik juga meningkat (Santoso, 2005).

Besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi daerah secara tegastercerin dalam Produk Domestik Bruto (PDRB) dan dampak positif dari proyek-proyek yang didanai atas prioritas pemerintah pusat yang selama ini diterima pemerintah daerah dan merupakan sumber pembiayaan terbesar bagi pemerintah daerah serta jumlah penduduk yang menetap pada suatu wilayah tersebut. Berikut merupakan data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pati tahun 1993-2013.

**Tabel 1**  
**Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pati Tahun 1993 – 2013**

Tahun	PAD	Tahun	PAD
1993	4.922.932.000	2004	55.030.348.945
1994	6.770.388.000	2005	57.150.612.888
1995	8.398.500.600	2006	66.197.687.376
1996	9.188.229.000	2007	78.965.731.871
1997	10.116.916.000	2008	80.583.674.489
1998	10.338.403.058	2009	90.396.847.846
1999	13.424.033.645	2010	112.526.536.706
2000	11.137.236.410	2011	134.475.561.623
2001	25.022.517.318	2012	163.733.665.531
2002	34.573.274.285	2013	169.127.415.979
2003	40.826.750.081		

Sumber: BPS

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa PAD Kabupaten Pati pada tahun 1994 mengalami kenaikan sebesar 37,53%, pada tahun 1995 mengalami kenaikan sebesar 24,05%, kemudian pada tahun 1996 mengalami kenaikan sebesar 9,40%, pada tahun 1997 mengalami kenaikan sebesar 10,11%, pada tahun 1998 mengalami kenaikan sebesar 2,19%, pada tahun 1999 mengalami kenaikan sebesar 29,85%, kemudian pada tahun 2000 mengalami penurunan sebesar 17,04% dan mengalami kenaikan kembali pada tahun 2001 sebesar 124,67%, sedangkan pada tahun 2002 mengalami kenaikan sebesar 38,17%, pada tahun 2003 mengalami kenaikan sebesar 18,09%, kemudian mengalami kenaikan kembali pada tahun 2004 sebesar 34,79%, pada tahun 2005 mengalami kenaikan sebesar 3,85%, kemudian pada tahun 2006 mengalami kenaikan sebesar 15,83%, pada tahun 2007 mengalami kenaikan sebesar 19,29%, kenaikan pada tahun 2008 sebesar 2,05%, kemudian pada tahun 2009 mengalami kenaikan sebesar 12.18%, pada tahun 2010 mengalami kenaikan sebesar 24,48%, kemudian pada tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar 19,51%, dan pada tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 21,76% serta pada tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 3,29%. Dengan data dan uraian kondisi perkembangan PAD Kabupaten Pati dari tahun ke tahun yang telah disajikan diatas, maka mendorong penulis untuk meneliti dan lebih mencermati Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pati tahun 1993-2013.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengambil perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap PAD Kabupaten Pati?
2. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap PAD Kabupaten Pati?
3. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap PAD Kabupaten Pati?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap PAD Kabupaten Pati.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap PAD Kabupaten Pati.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap PAD Kabupaten Pati.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan pertimbangan (masukan) para pengambil keputusan atau sebagai dasar dalam menentukan suatu kebijakan atau strategi pembiayaan anggaran pembangunan daerah kabupaten Pati.

2. Sebagai masukan untuk menentukan kebijakan pembangunan agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.
3. Sebagai tambahan referensi dan sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.

## **E. Metodologi Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kabupaten Pati. Daerah ini sengaja dipilih sebagai tempat penelitian karena penulis ingin mengetahui seberapa besar kemampuan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber keuangan daerah guna mewujudkan otonomi daerah.

### **2. Sumber Data**

Penelitian ini bersifat kuantitatif dan menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak kedua atau hasil dari pengumpulan suatu instansi dalam bentuk publikasi. Data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pati dan lembaga lembaga terkait terbitan tahun 1993-2013.

### **3. Jenis Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa deret berkala (time series) dari tahun 1993-2013. Data tersebut meliputi data Pendapatan Asli Daerah, Produk Domestik Regional Bruto, pengeluaran pemerintah dan jumlah penduduk di Kabupaten Pati yang di



peroleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pati dan lembaga lembaga terkait.

#### 4. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data untuk mencapai tujuan penelitian, penulis menggunakan analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk menguji data yang diambil dari buku literatur yang membahas tentang teori- teori bersangkutan. Data kuantitatif dinyatakan dalam angka- angka. Untuk hipotesisnya akan dianalisis menggunakan alat analisis regresi linier dengan metode OLS(*Ordinary Least Square*).

Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependennya. Jika persamaan regresi OLS sudah terbentuk maka dilakukan uji untuk membuktikan persamaan regresi OLS tersebut memenuhi asas sebagai persamaan regresi CNLRM (*Classical Normal Linier Regression Model*). Uji tersebut meliputi uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji normalitas residual, uji spesifikasi model, dan uji autokorelasi. Selanjutnya persamaan regresi dilakukan uji t, uji f dan interpretasi  $R^2$  untuk mengetahui signifikansi pengaruh masing - masing variabel baik secara individu maupun secara bersama - sama. Persamaan regresi ini sebagai berikut (Djarwanto Ps, 1993) :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots \beta_t X_t$$

Adapun regresi yang digunakan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X1_t + \beta_2 X2_t + \beta_3 X3_t + U_t$$

Keterangan :

Y = Pendapatan Asli Daerah

$B_0$  = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$  = Koefisien regresi

$X_1$  = Pendapatan Domestik Regional Bruto

$X_2$  = Pengeluaran Pemerintah

$X_3$  = Jumlah Penduduk

U = Residual

## **F. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini berisi tinjauan teori yang relevan dan merupakan dasar teoritis penelitian yang dilakukan, tinjauan terhadap penelitian yang dilakukan terdahulu dan hipotesis.

### **BAB III                    METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam bab ini diuraikan alat dan metode analisis *regresi linier* atau OLS (*Ordinary Least Square*) yang meliputi uji asumsi klasik ( multikolinearitas, heteroskedastisitas, uji normalitas residual, uji spesifikasi model, dan uji otokolerasi), Uji kelayakan model ( Interpretasi  $R^2$  dan uji f), Uji validitas pengaruh ( uji t), data dan sumber data serta definisi operasional variabel.

### **BAB IV                    ANALISIS DATA**

Dalam bab ini diuraikan tentang deskripsi output variabel independen terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pati, analisis data yang menitikberatkan pada hasil olahan data sesuai dengan alat dan teknik analisis yang digunakan serta diuraikan interpretasi ekonominya.

### **BAB V                    PENUTUP**

Dalam bab ini diuraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran- saran yang sesuai dengan hasil penelitian.

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**